

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Negara yaitu UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No 15 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan seiring dengan paradigma penyelenggaraan pemerintahan saat ini, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan sehingga sudah menjadi komitmen bersama yang harus dibangun segenap komponen pemerintahan agar pelayanan pada masyarakat dapat dioptimalkan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memperhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dengan memperhatikan hubungan pemerintah pusat-daerah, antar pemerintah daerah serta potensi daerah itu sendiri. Salah satu diantaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek Keuangan Daerah meliputi penggalan potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Bentuk pertanggungjawaban keuangan adalah berupa Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin sebagai entitas pelaporan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan serta standar akuntansi yang berlaku.

Adapun maksud dari penyusunan Laporan Keuangan ini adalah

- a Untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- b Untuk menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas
- c Untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, aset dan kinerja sebagai bahan evaluasi

Sedangkan tujuan penyusunan laporan ini adalah

- a menyediakan informasi mengenai jumlah aset dan ekuitas dana satuan kerja,
- b menyediakan informasi berkaitan dengan kemampuan dan kelemahan satuan kerja,
- c menyediakan informasi sebagai bahan evaluasi bagi pengambil keputusan,
- d menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya,
- e menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya,
- f menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan,
- g menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin atas pelaksanaan APBD Tahun 2019 adalah

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong,
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara,
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
- d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- f) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165),
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614),
- i) Peraturan Bupati Tapin Nomor 37 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapin,
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,
- l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah,
- m) Peraturan Bupati Tapin Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapin Berbasis Akrua,
- n) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,



- o) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
- p) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom,
- q) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Tapin,
- r) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin,
- s) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2020
- t) Peraturan Bupati Tapin Nomor 07 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2019
- u) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin 2005- 2025,
- v) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Gambaran Umum/Profil

- 2.1 Gambaran umum/Profil

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 4.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 4.2 Neraca
- 4.3 Laporan Operasional
- 4.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Bab V Penutup



BAB II

GAMBARAN UMUM, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. GAMBARAN UMUM

Dinas Tenaga Kerja merupakan salah satu Dinas daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin. Dasar hukum yang menjadi acuan adalah Peraturan Daerah No 09 tahun 2015 atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin dan Peraturan Bupati Tapin No 09 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin menetapkan kebijakan organisasi sebagai berikut

- 1) Peningkatan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pencari kerja bersama pihak terkait
- 2) Meningkatkan jumlah pelaksanaan bintek, pelatihan keterampilan, pelatihan kewirausahaan bagi pencari kerja dan pekerja
- 3) Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah tentang ketenagakerjaan dan jaminan sosial

Adapun unsur-unsur organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin terdiri dari

- a Sekretariat,
- b Bidang Peningkatan Kualitas, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja,
- c Bidang Hubungan Industrial, Syarat-syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,
- d Unit Pelaksana Teknis, dan
- e Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun visi, misi tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

- **Visi**

VISI DARI DINAS TENAGA KABUPATEN TAPIN ADALAH "TERWUJUDNYA TENAGA KERJA YANG PROFESIONAL DAN MANDIRI MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"

Untuk melaksanakan visi tersebut dijabarkan kedalam Misi sebagai berikut :

- **Misi**

- 1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Ketenagakerjaan
- 2 Menciptakan Tenaga Kerja yang Profesional dalam memasuki Pasar Kerja
- 3 Meningkatkan Kualitas Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan

- **Tujuan Strategik**

Program pembangunan bidang tenaga kerja merupakan program yang wajib dan menjadi prioritas dalam rangka mencapai target pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Adapun yang dijadikan tujuan adalah dalam hal penurunan tingkat pengangguran

- **Sasaran Strategik dan indikator Sasaran**

Sedangkan yang menjadi sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran meliputi

- 1 Meningkatkan kesempatan kerja
- 2 Meningkatnya kualitas angkatan kerja
- 3 Meningkatnya kualitas hubungan industrial dan ketenagakerjaan

Sedangkan Indikator Sasaran meliputi :

- 1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
- 2 Persentase Angkatan Kerja yang Berkualitas
- 3 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per tahun

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan disajikan dengan menggambarkan pencapaian kinerja keuangan masing-masing sasaran, program dan kegiatan telah diuraikan dalam Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2021

Realisasi belanja terhadap kegiatan yang dilaksanakan dari alokasi dana sebesar Rp 5 009 410 868,00 (*Lima milyar Sembilan juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah*) atau 97,83% dari anggaran sebesar Rp 5 120 600 856,00 (*lima milyar seratus dua puluh juta enam ratus ribu delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Secara ringkas capaian kinerja keuangan adalah sebagai berikut

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1. Belanja Pegawai :			
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1 157 947 487,00	1 160 790 678,00	100,25
Tunjangan Keluarga	95 018 068,00	93 207 794,00	98,09
Tunjangan Jabatan	136 720 000,00	135 370 000,00	99,01
Tunjangan Fungsional	12 405 000,00	12 340 000,00	99,48
Tunjangan Fungsional Umum	24 400 000,00	24 330 000,00	99,71
Tunjangan Beras	63 733 850,00	63 439 920,00	99,54
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7 167 785,00	5 890 530,00	82,18
Pembulatan Gaji	275 366,00	16 630,00	6,04
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1 118 200 000,00	1 118 600 000,00	100,04
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5 975 000,00	1 955 000,00	32,72
JUMLAH	2.621.842.556,00	2.615.940.552,00	99,77

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2. Belanja Barang dan Jasa :			
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	13 209 000,00	13 209 000,00	100,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	1 225 600,00	1 225 600,00	100,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	18 262 800,00	16 345 088,00	89,50
Belanja Bahan-Bahan Baku	75 350 900,00	75 079 150,00	99,64
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	440 400,00	440 400,00	100,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	17 465 000,00	17 465 000,00	100,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	5 800 000,00	4 800 000,00	82,76
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	69 953 400,00	69 593 600	99,49



Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	23 488 800,00	23 030 300,00	98,05
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	85 372 600,00	72 463 200,00	84,88
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4 669 800,00	2 226 700,00	47,68
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	140 000,00	140 000,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5 045 800,00	3 201 700,00	63,45
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10 706 500,00	10 706 500,00	100,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	525 320 000,00	521 356 000,00	99,25
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	52 241 100,00	42 785 000,00	81,90
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12 525 000,00	2 624 000,00	20,95
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	178 560 000,00	170 372 800,00	95,41
Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	45 029 600,00	45 988 800,00	102,13
Belanja Pakaian Batik Tradisional	7 000 000,00	7 000 000	100,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	56 400 000,00	56 400 000,00	100,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18 500 000,00	18 500 000,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	50 000 000,00	50 000 000,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	178 658 000,00	177 308 000,00	99,24
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	106 200 000,00	106 200 000,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	133 550 000,00	131 300 000,00	98,32
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	14 400 000,00	14 400 000	100,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	14 400 000,00	14 400 000,00	100,00
Belanja Jasa Teknisi Mekanik dan Listrik	5 250 000,00	5 250 000,00	100,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1 000 000,00	-	0,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	9 500 000,00	8 500 000,00	89,47
Belanja Tagihan Telepon	1 400 000,00	530 839,00	37,92
Belanja Tagihan Air	4 800 000,00	2 784 500,00	58,01
Belanja Tagihan Listrik	48 000 000,00	31 780 393,00	66,21
Belanja Kawat / Faksimili / Internet / TV Berlangganan	20 228 400,00	18 413 517,00	91,03
Belanja Pembayaran Pajak Bea, dan Perizinan	3 600 000,00	1 665 600,00	46,27
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	6 000 000,00	5 400 000,00	90,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4 000 000,00	2 000 000,00	50,00
Belanja Sewa Bangunan Terbuka	10 000 000,00	-	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	2 224 600,00	2 224 600,00	35,74
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	4 000 000,00	4 000 000,00	13,33
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur	30 000 000,00	29 810 000,00	0
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9 600 000,00	4 337 200,00	45,18



Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Kantor-Alat Kantor	8 100 000,00	5 610 000,00	69,26
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboraturum-Alat Laboratorium	400 000,00	400 000,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	139 268 000,00	138 373 390,00	99,36
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	159 984 000,00	159 977 399,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20 250 000,00	19 500 000,00	96,30
JUMLAH	2 241 519 300,00	2 109 118 216,00	94,09

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3 Belanja Modal :			
Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	357 600,00	357 600,00	100,00
Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	2 216 000,00	2 216 000,00	100,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	16 000 000,00	15 600 000,00	97,50
Belanja Modal Mebel	61 753 300,00	61 600 000,00	99,75
Belanja Modal Alat Pedingin	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10 350 000,00	9 600 000,00	92,75
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	17 500 000,00	17 500 000,00	100,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	12 644 100,00	12 360 250,00	97,76
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	76 463 900,00	75 809 600,00	99,14
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	33 268 400,00	33 208 650,00	99,82
Belanja Modal Suara	6 466 100,00	6 400 000,00	98,98
Belanja Modal Ternak Lainnya	39 219 600,00	38 700 000,00	98,68
JUMLAH	287 239 000,00	284.352 100,00	98,99

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Pada dasarnya semua program bisa dilaksanakan, hanya saja ada kendala teknis dan non teknis yang terjadi sehingga capaian kinerja pada tahun 2021 hanya mencapai 97,83%

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

4.1.1 Belanja

Struktur Belanja sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu

- a Belanja Operasi,
- b Belanja Modal,
- c Belanja Tak Terduga, dan
- d Belanja Transfer

Realisasi belanja secara keseluruhan periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp. 5.009.410.868,00** atau 97,83% dari anggaran belanja tahun 2021 sebesar **Rp. 5.120.600.856,00** yang terdiri dari

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasi	4.833.361.856,00	4.725.058.768,00	97,76
2	Belanja Modal	287.239.000,00	284.652.100,00	98,99
Jumlah Belanja		5.120.600.856,00	5.009.410.868,00	97,83

4.1.1.1 Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi secara keseluruhan periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp. 4.725.058.768,00** atau 97,76 % dari anggaran belanja operasi tahun 2021 **Rp. 4.833.361.856,00** yang terdiri dari

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	2.621.842.556,00	2.615.940.552,00	99,77
2	Belanja Barang dan Jasa	2.211.519.300,00	2.109.118.216,00	95,37
Jumlah		4.833.361.856,00	4.725.058.768,00	97,76



Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 2 615 940.552,00 merupakan realisasi pembayaran.

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1. Belanja Pegawai			
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1 157 947 487,00	1 160 790 678,00	100,25
Tunjangan Keluarga	95 018 068,00	93 207 794,00	98,09
Tunjangan Jabatan	136 720 000,00	135 370 000,00	99,01
Tunjangan Fungsional	12 405 000,00	12 340 000,00	99,48
Tunjangan Fungsional Umum	24 400 000,00	24 330 000,00	99,71
Tunjangan Beras	63 733 850,00	63 439 920,00	99,54
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7 167 785,00	5 890 530,00	82,18
Pembulatan Gaji	275 366,00	16 630,00	6,04
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1 118 200 000,00	1 118 600 000,00	100,04
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5 975 000,00	1 955 000,00	32,72
JUMLAH	2 621.842 556,00	2 615.940 552,00	99,77

Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 2 109.118 216,00 merupakan realisasi pembayaran

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2 Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	13 209 000,00	13 209 000,00	100,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	1 225 600,00	1 225 600,00	100,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	18 262 800,00	16 345 088,00	89,50
Belanja Bahan-Bahan Baku	75 350 900,00	75 079 150,00	99,64
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	440 400,00	440 400,00	100,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	17 465 000,00	17 465 000,00	100,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	5 800 000,00	4 800 000,00	82,76
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	69 953 400,00	69 593 600	99,49
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	23 488 800,00	23 030 300,00	98,05
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	85 372 600,00	72 463 200,00	84,88
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4 669 800,00	2 226 700,00	47,68
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	140 000,00	140 000,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5 045 800,00	3 201 700,00	63,45
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10 706 500,00	10 706 500,00	100,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	525 320 000,00	521 356 000,00	99,25



Belanja Makanan dan Minuman Rapat	52 241 100,00	42 785 000,00	81,90
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12 525 000,00	2 624 000,00	20,95
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	178 560 000,00	170 372 800,00	95,41
Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	45 029 600,00	45 988 800,00	102,13
Belanja Pakaian Batik Tradisional	7 000 000,00	7 000 000	100,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	56 400 000,00	56 400 000,00	100,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18 500 000,00	18 500 000,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	50 000 000,00	50 000 000,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	178 658 000,00	177 308 000,00	99,24
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	106 200 000,00	106 200 000,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	133 550 000,00	131 300 000,00	98,32
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	14 400 000,00	14 400 000	100,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	14 400 000,00	14 400 000,00	100,00
Belanja Jasa Teknisi Mekanik dan Listrik	5 250 000,00	5 250 000,00	100,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1 000 000,00	-	0,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	9 500 000,00	8 500 000,00	89,47
Belanja Tagihan Telepon	1 400 000,00	530 839,00	37,92
Belanja Tagihan Air	4 800 000,00	2 784 500,00	58,01
Belanja Tagihan Listrik	48 000 000,00	31 780 393,00	66,21
Belanja Kawat / Faksimili / Internet / TV Berlangganan	20 228 400,00	18 413 517,00	91,03
Belanja Pembayaran Pajak Bea, dan Perizinan	3 600 000,00	1 665 600,00	46,27
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	6 000 000,00	5 400 000,00	90,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4 000 000,00	2 000 000,00	50,00
Belanja Sewa Bangunan Terbuka	10 000 000,00	-	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	2 224 600,00	2 224 600,00	35,74
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	4 000 000,00	4 000 000,00	13,33
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur	30 000 000,00	29 810 000,00	99,30
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9 600 000,00	4 337 200,00	45,18
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Kantor-Alat Kantor	8 100 000,00	5 610 000,00	69,26
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium	400 000,00	400 000,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	139 268 000 00	138 373 390 00	99,36
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	159 984 000,00	159 977 399,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20 250 000,00	19 500 000,00	96,30
JUMLAH	2 241 519 300,00	2 109 118 216,00	94,09



4.1.1.2 Belanja Modal

Realisasi belanja modal secara keseluruhan periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp. 284.352.100,00** atau 98,99% dari anggaran belanja modal tahun 2021 sebesar **Rp. 287.239.000,00** yang terdiri dari

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	248 019 400,00	245 652 100,00	99,05
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	39 219 600,00	38 700 000,00	98,68
Jumlah		287 239.000,00	284 352.100,00	98,99

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar **Rp. 245 652 100,00** merupakan realisasi pembayaran

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1. Belanja Modal :			
Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	357 600,00	357 600,00	100,00
Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	2 216 000,00	2 216 000,00	100,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	16 000 000,00	15 600 000,00	97,50
Belanja Modal Mebel	61 753 300,00	61 600 000,00	99,75
Belanja Modal Alat Pedingin	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10 350 000,00	9 600 000,00	92,75
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	17 500 000,00	17 500 000,00	100,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	12 644 100,00	12 360 250,00	97,76
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	76 463 900,00	75 809 600,00	99,14
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	33 268 400,00	33 208 650,00	99,82
Belanja Modal Suara	6 466 100,00	6 400 000,00	98,98
JUMLAH	248 019 400,00	245 652.100,00	98,99

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar **Rp. 38 700 000,00** merupakan realisasi pembayaran

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan :			
Belanja Modal Ternak Lainnya	39 219 600,00	38 700 000,00	98,68
JUMLAH	39 219 600,00	38.700 000,00	98,68

Surplus / (Defisit)

Realisasi surplus/(defisit) per 31 Desember 2021 adalah defisit sebesar (Rp 5 009 410 868,00) dari defisit yang dianggarkan sebesar (Rp 5 120 600 856,00) atau 97,83%



4.2

4.3 Neraca

4.3.1 Aset

Aset Lancar**Kas Di Bendahara Pengeluaran**

Merupakan saldo Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) oleh Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 0,00

Persediaan

	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
Persediaan	1 200 000,00	275 000,00

Saldo persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 1 200 000,00

Aset Tetap

Saldo aset tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp 2 529 708 240,00 yang terdiri dari

	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
1 Tanah	1 799 450 000,00	1 799 450 000,00
2 Peralatan dan Mesin	585 840 950,00	361 471 100,00
3 Gedung dan Bangunan	2 218 331 000,00	2 218 331 000,00
4 Akumulasi Penyusutan	(2 073 913 710,00)	(1 993 842 365,00)

1. Tanah

	TA 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
Tanah	1 799 450 000,00	1 799 450 000,00

Saldo tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp 1 799 450 000,00 dengan rincian mutasi selama periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut

Saldo akhir per 31 Desember 2021	Rp	1 799 450 000,00
Jumlah	Rp.	1.799 450.000,00



2 Peralatan dan Mesin

	TA. 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
Peralatan dan Mesin	585 840 950,00	361 471 100,00
Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp 585 840 950,00 dengan rincian mutasi selama periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut		
Saldo akhir per 31 Desember 2020	Rp	361 471 100,00
Penambahan (berupa belanja modal-pengadaan peralatan gedung kantor)	Rp	245 652 100,00
Pengurangan (berupa barang ekstrakom, reklasifikasi peralatan mesin ke aset rusak berat (asset lainnya))	Rp	21 282 000,00
Jumlah	Rp	628 405 450,00

Adapun penambahan dikarenakan belanja modal-pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor atas pembelian alat pendingin berupa kipas angin sebanyak 8 buah dan AC 1 buah untuk melengkapi peralatan kantor yang masih kurang dan melengkapi fasilitas aula kantor yang sering digunakan untuk acara pertemuan, sosialisasi, rapat, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin dan digunakan untuk pembukaan, penutupan dan seleksi calon peserta pelatihan BLK Kabupaten Tapin

3 Gedung dan Bangunan

	TA. 2021 (Rp)	TA 2020 (Rp)
Gedung dan Bangunan	2 218 331 000,00	2 218 331 000,00

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 2 218 331 000,00 dengan rincian mutasi selama periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut

Saldo akhir per 31 Desember 2021	Rp	2 218 331 000,00
Penambahan (berupa belanja modal-pengadaan bangunan gedung kantor)	Rp	0,00
Jumlah	Rp	2 218 331 000,00

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 2 218 331 000,00

4.3.2 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp 2 073 913 710,00 dan Rp 1 993 842 365,00. Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	585 840 950,00	328 413 485,00	257 427 465,00
2	Gedung dan Bangunan	2 218 331 000,00	1 745 500 225,00	472 830 775,00
	Jumlah Akumulasi Penyusutan	2 804 171 950,00	2 073 913 710,00	730 258 240

4.3.3 Aset lain-lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain. Adapun saldo aset lain-lain per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 0,00, karena nilai perolehan Aset lain-lain sebesar Rp 30 238 000,00 yang kemudian disusutkan dengan nilai akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar Rp 30 238 000,00 sehingga Nilai bukunya menjadi Rp 0,00.

4.3.4 Kewajiban

Utang Beban

Saldo utang beban untuk per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 359 000,00 dan Rp 4 062 551,00. Saldo utang beban per 31 Desember 2021 merupakan utang beban disebabkan adanya belanja terutang atas pembayaran belanja air dan belanja telepon yang dipakai pada bulan Desember 2021 tapi baru dibayar pada bulan Januari 2022.



Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

Saldo Kewajiban untuk Dikonsolidasikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 5 009 410 868,00 merupakan total realisasi belanja operasi dan belanja modal. Kewajiban untuk dikonsolidasikan merupakan salah satu bagian dari utang jangka pendek.

4.3.5 Ekuitas

Saldo ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp 2 530 549 240,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

4.4 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional (LO)

4.4.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 2 615 940 552,00 dan Rp 2 171 955 552,00. Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian beban pegawai untuk tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban Pegawai	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Naik (turun) %
Beban Gaji	1 160 790 678,00	999 582 808,00	16,13
Beban Tunjangan	334 578 244,00	276 561 172,00	20,98
Beban Tambahan Penghasilan	1 118 600 000,00	895 800 000,00	24,87
Pembulatan Gaji	16 630,00	11 572,00	43,71
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 955 000,00	-	100
Jumlah Beban Pegawai	2 615 940 552,00	2 171 955 552,00	20,44



4.4.2 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 2 104 489 665,00 dan Rp 1 085 898 071,00. Beban barang dan jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian beban barang dan jasa untuk tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian jenis Beban Barang dan Jasa	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Naik (turun) %
Beban Barang dan Jasa	2 104 489 665,00	1 085 898 071,00	77
Beban Persediaan (per 01 Januari 2021 (debit))	1 200 000,00	275 000,00	(51)
Beban utang air (saldo akhir per 31 Desember 2021)	97 500,00	271 000,00	(57)
Beban utang listrik (saldo akhir per 31 Desember 2021)	2 392 534,00	2 392 534,00	(58)
Beban utang internet (beban tahun 2021 yang sudah dibayar)	1 572 517,00	0	1
Beban persediaan (saldo akhir per 31 Desember 2021 (kredit))	1 200 000,00	(275 000,-)	18
Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (kapitalisasi) (kredit)	-	-	-
Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (kapitalisasi) (kredit)	-	-	-
Beban Honorarium Pejabat/ Penerima/Pemeriksa Barang/Jasa (kapitalisasi) (kredit)	-	-	-



Beban Jasa Konsultansi Perencanaan (kapitalisasi) (kredit)	-	-	-
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan (kapitalisasi) (kredit)	-	-	-
Jumlah Beban Barang dan Jasa	2 104 489 665,00	1 085 898 071,00	114

4.4.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 80 071 345,00 dan Rp 465 175 233,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disesuaikan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk aset tak berwujud. Rincian beban penyusutan dan amortisasi untuk tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban Penyusutan dan Amortisasi	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik (turun) %
Beban penyusutan peralatan dan mesin	35 796 445,00	21 998 333,00	62,72
Beban penyusutan gedung dan bangunan	44 274 900,00	443 176 900,00	(90,01)
Jumlah penyusutan	80 071 345,00	465 175 233,00	(82,79)
Jumlah amortisasi	0	0	0
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	80 071.345,00	465 175 233,00	(82,79)



4.5 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

4.5.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 2 381 622 184,00 dan Rp 2 401 528 242,00

4.5.2 Surplus/Defisit-LO

Jumlah defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp 4 817 195 562,00 dan Rp 3 973 416 856,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa

4.5.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar

Koreksi Ekuitas atas Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Koreksi Ekuitas atas Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 43 288 250,00

4.5.4 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 2 530 549 240,00 dan Rp 2 381 622 184,00

BAB V**PENUTUP**

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan salah satu bagian dari Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021 yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Catatan Atas Laporan Keuangan ini disusun dengan mengungkapkan beberapa penjelasan terhadap laporan keuangan secara keseluruhan sehingga diharapkan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna laporan dan dapat dipahami oleh pembaca secara luas.

Semoga dengan tersusunnya Catatan Atas Laporan Keuangan ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin.

Rantau, 31 Maret 2022



HI FAUZIAH S Sos M AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19660107 198703 2 008

